

Partisipasi Politik Perempuan dalam Konstruksi Sosial Budaya Media

Elly Malihah

Prodi Pend. Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia

Jl Setiabudi 229 Bandung

HP. 085861655587, e-mail. fivally@yahoo.com

Abstract

The research examined woman's political participation in four different regions in West Java. The main problems of this research were why the participation of women in politics in formal institutions relatively low and how the media construct gender role. This research used descriptive qualitative method. The using of descriptive qualitative method is very essential to describe the group status and scene of the events which has occurred. The qualitative approach emphasizes research procedures with ethnographic studies to understand the life of the society based on the holistic point of view. The research findings shows the lack of woman participation as the representative. The low representation of women in direct political participation (to be the party members, members of parliament and judge of political decision) was influenced by various factors. They included electoral system, the recruitment of party cadres, women's unwillingness to plunge directly into the world of practical politics, patriarchy cultural factors and religion's doctrine, and incapability of women to solve lots of real-problems. Another factor was the media of sociocultural reconstruction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberi gambaran tentang Partisipasi Politik Perempuan di Empat Daerah di Jawa Barat dan bagaimana konstruksi sosial budaya tentang peran gender. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan status kelompok sebagai objek dan peristiwa yang berlangsung. Pendekatan subjektif data kualitatif menekankan pada prosedur penelitian dengan kajian etnografi untuk memahami kehidupan masyarakat berdasarkan sudut pandang dari masyarakat itu secara holistik. Penambahan data kuantitatif digunakan untuk melihat apakah gambaran itu berlaku secara umum melalui persepsi masyarakat terhadap partisipasi politik perempuan dan konstruksi sosial budaya media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik langsung (menjadi kader partai, anggota parlemen, dan pemutus kebijakan politik) dipengaruhi oleh berbagai faktor, sistem pemilihan umum dan perekrutan kader partai, ketidakmauan perempuan terjun langsung ke dunia politik praktis, masih ada anggapan keliru (persepsi masyarakat terhadap dunia politik), faktor budaya patriarkhat dan doktrin agama, serta ketidakmampuan perempuan mengatasi masalah, faktor lain yang mempengaruhi adalah konstruksi sosial budaya media.

Kata kunci : media, partisipasi politik, dan perempuan

Pendahuluan

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia tidak akan terlepas dari pengaruh per-caturan politik dan informasi global, karenanya berbagai instrumen dikembangkan untuk mempersiapkan globalisasi tersebut. Berbagai instrumen dibangun untuk menghadapi globalisasi ini antara lain dibukanya saluran informasi yang transparan melalui media (baik cetak maupun elektronik). Media dipandang efektif sebagai saluran informasi yang dapat menyampaikan berbagai pesan, termasuk program pembangunan. Melalui media pesan dapat berdampak positif maupun negatif, pesan yang positif dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat penikmat media, pun sebaliknya dapat menjadi pesan yang tidak mendidik.

Berbagai penelitian tentang peran media telah banyak dilakukan, antara lain tentang media dan bias gender. Hasil penelitian Rahmawati, dan kawan-kawan tentang bias gender dalam Iklan *Attack Easy* di Televisi menunjukkan masih terjadinya bias gender. Perempuan berada dalam posisi yang dirugikan, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian pekerjaan rumah tangga. Laki-laki atau kepala rumah tangga selalu berada di atas perempuan (Rahmawati, 2010:1).

Media (cetak maupun elektronik) disadari atau tidak turut mekontruksi dan melanggengkan ketidakseimbangan peran gender, sehingga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik perempuan dalam lembaga formal maupun dalam aktivitas pembangunan lainnya.

Sementara itu salah satu program pembangunan nasional adalah mengikutsertakan seluruh warga negara untuk berpartisipasi, yaitu dengan dikembangkan model partisipasi pembangunan berwawasan gender. Namun pada taraf implementasinya masih terjadi ketimpangan gender, antara lain ditandai dengan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga formal.

Program keikutsertaan perempuan dalam aktivitas publik, secara normatif terus diupayakan, hal ini sebagaimana tertulis dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014 menegaskan kembali tentang partisipasi perempuan, yaitu; untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses

dan partisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan. Demikian pula peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak dilanjutkan. Keberadaan berbagai fasilitas yang telah dibangun pada periode 2004-2009, antara lain, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabupaten atau kota, harus terus kita perluas di seluruh pelosok tanah air. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, peran kaum perempuan di sektor publik harus terus ditingkatkan. Untuk itu, harus terus diperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial (RPJMN 2010-2014, buku I-37, www.bappedajateng).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 (Sinar Grafika, 2005:104) menjelaskan;

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Arah kebijakan pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2004-2009 dan 2010-2014 dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan memerlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan antara lain *meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik*. Perempuan akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik disamping laki-laki apabila ia

mendapatkan kesempatan berkembang yang sama. Keadaan ini menjadi mungkin untuk perempuan apabila perempuan memiliki pendidikan dan pemahaman yang jelas akan tugasnya di samping laki-laki, begitupun pemahaman yang sama harus dimiliki oleh laki-laki. Harapan seperti ini rupanya belum mendapatkan dukungan fakta tentang keadaan perempuan sebenarnya di lapangan. Pendapat ini didasarkan pada keadaan demografis yang menunjukkan bahwa jumlah perempuan di Indonesia mencapai 50 persen lebih dari seluruh jumlah penduduk Indonesia.

Kecenderungan dewasa ini menunjukkan bahwa perempuan di satu pihak dituntut untuk mengambil tanggung jawab pembangunan dan di pihak lain ia juga dituntut untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Keinginan dan kemampuan perempuan untuk turut serta mengisi pembangunan, dan khususnya proses pengambilan keputusan politik telah menunjukkan hal yang menggembirakan, namun keinginan tersebut kadangkala terbentur dengan berbagai kepentingan lain, sehingga mengalami hambatan. Salah satu hambatan partisipasi perempuan untuk berpartisipasi adalah adanya kontruksi sosial budaya masyarakat termasuk media yang turut memperkokoh ketidakadilan gender.

Oleh sebab itu penting diteliti latar belakang rendahnya partisipasi perempuan manakala dilihat dari angka keterwakilan perempuan dalam posisi lembaga formal. Dalam mengkaji rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif penting juga diteliti peran media dalam mekonstruksi sosial budaya perempuan baik sebagai pemilih (*voters*) maupun pencerahan pentingnya partisipasi politik perempuan bagi seluruh masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif (paradigma fenomenologi). Disebut penelitian deskriptif karena penelitian ini diungkapkan secara rinci dan sistematis tentang bagaimana Partisipasi Perempuan dalam Politik serta bagaimana media dalam merkonstruksi sosial budaya peran perempuan. Sedangkan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan meng-

gambarkan keadaan sebagaimana adanya dan berusaha memandang dari sudut pandang pelaku, (dikembangkan dari Creswell W. John. 1994).

Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk memahami dan memfokuskan pada gejala dan fakta sosial tentang rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan serta mengkaji dan menelusuri hambatan yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi tersebut, baik perempuan secara individu maupun secara bersama dalam organisasi sosial-politik dan profesinya. Dengan penelitian kualitatif melalui observasi langsung dan wawancara mendalam terlihat bagaimana kiprah dan perjuangan perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan pembangunan masyarakat.

Sasaran penelitian ini adalah perempuan yang mewakili dan terdapat di empat kabupaten dan kota di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut. Keempat daerah tersebut dipilih secara acak, yang dapat dianggap mewakili karakteristik masyarakat Jawa Barat. Data didapatkan dari sejumlah informan, dan informan termasuk sebagai pelaku itu penting artinya karena menghasilkan informasi yang mendalam dan menyeluruh. Menggunakan informan berhubungan dengan pihak ketiga, yang dengan kata lain menginginkan informasi mengenai pengetahuan yang dimiliki informan (Vredenberg, 1978:75).

Data primer diperoleh dari mewawancarai tokoh perempuan dari berbagai kalangan untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Selanjutnya dilakukan observasi mengenai partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan masyarakat di Jawa Barat dalam kegiatan produktif dan urusan organisasinya. Dengan memadukan data hasil wawancara dengan hasil observasi maka terkumpul informasi yang lebih akurat. Selain itu, penambahan hasil kajian kepustakaan diharapkan melengkapi informasi yang menghasilkan suatu informasi yang bersifat holistik. Untuk memperoleh gambaran umum maka ditambahkan data kuantitatif diperoleh dari angket atau kuesioner sebanyak 120 yang diambil dari responden dan terpilih secara acak yang dalam pembahasan menunjukkan bagaimana warga masyarakat menilai par-

tisipasi perempuan dalam rekonstruksi media massa yang merupakan bagian dari *triangulasi* dalam penelitian kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konstruksi Sosial Budaya Media tentang Partisipasi dan Pencitraan Politik Perempuan

Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana konstruksi sosial budaya media tentang partisipasi politik perempuan. Media dapat berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif mendorong partisipasi politik perempuan.

Penciptaan iklim yang kondusif dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, sebagaimana pendapat Maran (2001:156), menyebutkan salah satu faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, misalnya minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi formal. Disamping faktor situasi lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Iklim yang kondusif ini dapat dibentuk melalui kampanye yang menarik melalui tayangan berbagai media komunikasi, termasuk pencitraan diri kandidat. Penciptaan iklim yang kondusif untuk berpartisipasi melalui media sebenarnya dimulai bukan hanya menjelang pemilu, melainkan sejak awal agar pemilih atau calon pemilih memperoleh pencerahan terutama tentang konstruksi sosial budaya yang selama ini dibangun dan diwariskan secara turun temurun tentang peran gender. Dengan demikian, masyarakat tergerak untuk berpartisipasi tidak hanya untuk kepentingan sesaat melainkan untuk kepentingan abadi yaitu merekonstruksi berbagai masalah dan mencari solusi terbaik (Malihah, 2009: 59).

Sejak reformasi bergulir, efektivitas komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan politik makin terbuka, seiring dengan terbukanya kran politik yang lebih longgar. Jika pada masa orde baru memberitakan isu kegagalan pemerintah dianggap sebagai hal yang tabu, maka di era reformasi ini seiring dengan demokratisasi di bidang

politik, maka mengkritisi kebijakan pemerintah melalui berbagai media menjadi sesuatu hal yang lumrah. Menjamurnya partai politik dan bebasnya mencari dukungan massa dalam setiap pemilu, pilpres maupun pilkada melalui media elektronik dalam bentuk iklan-iklan politik menjadi bagian dari menu politik, sehingga politik yang dulunya dianggap sebagai hal yang tabu, menakutkan, maka dalam era reformasi politik sudah menjadi bagian dari selera masyarakat untuk menentukan pilihannya. Termasuk pemberiann kesempatan bagi perempuan untuk masuk ke ranah politik, yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin.

Kenyataan ini melandasi adanya perubahan perilaku politik seiring dengan kebebasan menentukan suara, dan makin bebasnya masyarakat mengakses dan menilai kebijakan publik, maka popularitas politik dan tingkat elektabilitas kandidat politik sangat dinamis. Artinya popularitas dan elektabilitas kandidat bisa saja sewaktu-waktu berubah tergantung kondisi politik yang terjadi pada masa itu. Demikian juga bentuk partisipasi politik masyarakat yang pada masa lalu sangat mudah diidentifikasi, bahwa suatu daerah adalah basis dukungan massa partai politik tertentu, maka dewasa ini, kondisi seperti itu tidak dapat dijadikan referensi bagi perolehan suara suatu partai politik atau kandidat politik. Berubah-ubahnya orientasi, sikap dan perilaku politik masyarakat yang beragam, memudahkan bagi media untuk mengisi ruang tersebut sehingga mempengaruhi pilihan para pemirsa untuk memilih kandidat calon legislatif ataupun calon eksekutif dengan memakai iklan pencitraan diri, sehingga kualitas partai dan kandidat politik tidak dilihat dari kapasitasnya sebagai politisi atau negarawan, melainkan dilihat dari punya dan tidaknya dana untuk menggalang dukungan massa.

Dalam komunikasi politik, opini publik merupakan senjata yang ampuh dalam mengambil simpati para pemilih. Salah satu contoh seperti dalam kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat, bagaimana dengan membentuk opini publik yang kuat tentang kegagalan pemerintahan Bush dalam mengantisipasi tragedi 9/11, John Kerry, kandidat dari Partai Demokrat dapat mengungguli partisipasi politik pemilih dalam jejak pendapat yang diadakan berbagai media center. Begitupun dengan pilpres putaran kedua pada

pemilu 2004 bagaimana simpati masyarakat kembali ditarik ulur oleh kedua pasangan yang lolos untuk dipilih pada tanggal 20 September 2004 (Malihah, Elly, 2011).

Keberhasilan pengaruh opini pada dua kali pemilu yang sudah lewat tidak lepas dari peran para pemimpin opini (*opinion leaders*) dan media. Para pemimpin opini selalu muncul dalam media baik cetak maupun elektronik untuk menjawab, mengembangkan ataupun membentuk isu-isu politik baru. Pada pemilu legislatif, isu yang berkembang pada pemilih pasif lebih pada faktor teknis dan kemasan media dibandingkan faktor visi dan *platform* partai politik.

Dari beberapa analisa perubahan di atas, salah satu faktor yang dipandang cukup penting adalah peran teknologi komunikasi dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih dan pengaruhnya pada metode kampanye para konstantan pemilu. Penggunaan media yang lebih interaktif, bahasa-bahasa kampanye yang komunikatif dan simbol-simbol yang lebih atraktif membuat masyarakat pemilih terbuai dalam politik populer (*pop politics*) dengan ideologi populer (*pop ideology*).

Media Massa memiliki peran besar dalam mengembangkan dan menyebarkanluaskan wacana dan peristiwa internasional, isu, wacana dan peristiwa yang berkembang atau terjadi di sebuah Negara dengan cepat akan menyebar ke negara-negara lain berkat pemberitaan media massa. Peristiwa yang bisa diangkat sebagai contoh adalah maraknya aksi gerakan mahasiswa di berbagai kota di Indonesiapada akhir 1980-1n dan terutama pada tahun 1990-an. Berkembangnya gerakan mahasiswa Indonesia tersebut tidak terlepas dari peran media massa dalam memberitakan kebangkitan gerakan mahasiswa di Philipina yang menuntut Ferdinand Marcos mundur dari jabatannya tanun 1986 dan aksi gerakan mahasiswa Cina di lapangan Tiananmen pada tahu 1989 menentang pemerintahan sosialis dan menuntut pemerintahan yang demokratis (Dewi, 2009: 229)

Kaitannya dengan perubahan partisipasi politik perempuan, media dapat menjadi sarana pencerahan bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik setelah ditampilkannya gerakan kaum perempuan di berbagai belahan dunia sehingga pe-

rempuan Indonesia tergerak untuk berpartisipasi di ranah publik, demikian pula dengan saya, disamping sudah terbiasa berorganisasi sejak kuliah dan di lingkungan masyarakat gerakan aktivis perempuan di seluruh dunia menjadi spirit tersendiri (wawancara dengan informan anggota DPRD Jawa Barat).

Di samping itu media dapat membantu jutaan pemilih untuk dapat menentukan pilihannya. Iklan televisi dan radio yang terus menerus, pembuatan media-media baik atraktif maupun interaktif dan pembentukan opini-opini lewat media mampu mempengaruhi pilihan para penyumbang suara (*voters*). Pengaruh lainnya ialah mampu mengarahkan prioritas para pemilih terhadap kandidat pilihannya, walaupun hal ini masih dipengaruhi juga dengan tingkat kepuasan para pemilih terhadap perilaku kandidat yang bersangkutan. Dalam ilmu komunikasi di kenal istilah *spiral of silence* untuk menjelaskan fenomena bagaimana suatu informasi mampu muncul dan mempunyai *feedback* yang luas sedangkan isu yang lain malah semakin mengecil. Begitu juga dalam pembentukan opini, jika suatu opini sudah mendapat publikasi yang besar dan terus-menerus maka isu tersebut akan tumbuh, terlepas dari konteks apakah itu isu negatif ataupun positif.

Kesempatan politik bagi kaum perempuan di seluruh dunia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan karena mendapat momen yang tepat pasca konferensi Beijing banyak didukung oleh peran media massa dalam menyebarluaskan hasil konferensi sekaligus sebagai wadah bagi para aktivis perempaun untuk mewacanakan isu-isu perempuan. Media Massa, terutama televisi dan surat kabar memainkan peran penting dalam mempengaruhi masyarakat umum (Dewi, 2009: 230)

Sejalan dengan penjelasan tersebut, di keempat daerah penelitian ditemukan, bahwa perempuan yang terpilih menduduki kursi legislatif adalah mereka yang mampu mengakses media, baik cetak maupun elektronik sebagai sarana kampanye. Di samping itu dari hasil wawancara mendalam ditemukan bahwa peran media sangat besar dalam membangun opini publik tentang partisipasi perempuan. Mereka memilih kandidat perempuan yang dipromosikan oleh media sebagai sosok yang sukses membangun kehidupan keluar-

ganya sehingga dengan tidak ragu *voters* memilihnya, pun ada beberapa yang memilih sosok kandidat perempuan karena kesuksesannya dalam karir bahkan ada yang memilih karena kandidat tersebut dikecewakan oleh mantan suaminya.

Selanjutnya media dapat membangun pencitraan perempuan sehingga perempuan tidak lagi dianggap sebagai warga Negara kelas dua, mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk maju ke gelanggang politik. Sebaliknya media pun dapat melanggengkan konstruksi sosial budaya yang selama ini dibangun, yaitu pembedaan peran perempuan dan laki-laki, khususnya dalam partisipasi politik perempuan yang dianggap bukan ranahnya. Ingatlah ketika media melansir pernyataan haramnya perempuan menjadi presiden, membuat sebagian pemilih menarik dukungannya terhadap kandidat perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut, Deddy Mulyana (1999:157) menyebutkan bahwa Persepsi negatif tentang perempuan ini juga amat kuat dibentuk oleh media yang sering memvisualisasikan perempuan berbeda dengan laki-laki. Media menggambarkan perempuan dengan laki-laki sebagai sesuatu yang mempunyai kegiatan yang berbeda dan memutuskan hal-hal yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda pula.

Penggambaran perempuan dalam media di berbagai Negara, menampilkan perempuan sebagai orang yang patuh tidak mementingkan diri, ibu dan isteri yang selalu berkorban, objek seks dan lain-lain yang menggambarkan perempuan dalam posisi yang lemah (Jurnal Perempuan, 2003:32, dalam Atty, dan kawan-kawan, 2007). Namun, media tidak selamanya sebagai saluran yang menggambarkan perempuan secara negatif. Media juga mampu mengangkat posisi perempuan sederajat dengan laki-laki bila digunakan sebagai media strategi komunikasi. Penyampaian pesan politik melalui media sangat tepat menggunakan teori difusi inovasi (Effendy, 1993: 284).

Hasil wawancara dengan aktivis di Kabupaten Bogor dan Garut menyebutkan, banyak perempuan yang enggan masuk ke ranah politik karena politik identik dengan dunianya laki-laki, keyakinan ini mereka dapatkan secara turun temurun dari orang tua, keluarga dan masyarakat dimana perempuan itu hidup, dan semakin di-

perkuat dengan berbagai pemberitaan media yang sering memojokkan kaum perempuan, perempuan dalam media sering hanya tampil sebagai pengisi hiburan dengan menonjolkan sisi menarik dari tubuh perempuan sementara berbagai ranah pembangunan dianggap milik laki-laki (Wawancara Hj. T, Informan Kabupaten Bogor). Umumnya perempuan masih segan masuk dunia politik praktis karena masih beranggapan politik tidak ramah dengan mereka, apalagi jika mereka mendengar dari media tentang adanya ulama yang beranggapan perempuan haram menjadi pemimpin, di daerah kami perempuan umumnya masih mengikuti apa yang diucapkan gurunya (informan Kab. Garut).

Di Kota Bandung sebagai ibukota Jawa Barat, masyarakat umumnya sudah melek politik, mereka dapat memilih dan memilah siapa yang patut dipilih, namun demikian manakala media, khususnya televisi memberitakan secara berlebihan tentang kandidat pasti akan mempengaruhi pertimbangan mereka (Informan Kota Bandung).

Sementara itu informan Kota Cirebon menyebutkan, figur dan ketokohan masih melekat kuat di daerahnya, sehingga kampanye dipengaruhi juga seberapa kuat tokoh masyarakat ikut mendukung kandidat, namun demikian seiring dengan cepatnya arus informasi media juga sangat diperlukan untuk mempromosikan kandidat, terbukti ramai-ramai kandidat mengiklankan diri di media lokal maupun melalui selebaran (leaflet, baligo, dan lain-lain)

Seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan akan hiburan dan informasi, dari hasil pengamatan penulis, di empat daerah penelitian (Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut dan Kota Cirebon) rata-rata penduduknya memiliki televisi sebagai media hiburan dan informasi. Mereka dengan mudah mengakses berbagai berita dan hiburan. Sehingga media massa, khususnya televisi akan mudah menyampaikan berbagai pesan, termasuk manakala pesan melanggengkan ketidakadilan gender yaitu dengan menayangkan berbagai berita yang tidak memihak kaum perempuan, seperti perempuan tidak layak memasuki dunia politik dan perempuan hanya layak mengisi panggung hiburan dengan menampilkan artis seksi untuk menarik para

pemilih memilih kandidat pria bukan kandidat perempuan

Suara Merdeka.com mengangkat tulisan tentang Biasa Gender dalam Media Massa. Perempuan dan media massa memiliki kaitan yang erat dan saling melengkapi. Perempuan dan media massa ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Perempuan banyak yang memanfaatkan jasa media massa untuk meningkatkan popularitasnya, sebaliknya media massa memerlukan sentuhan nuansa khas dari seorang perempuan, mulai dari sisi keberhasilan karier dan jabatannya, ketegaran menyikapi persoalan hidup, kenekadannya dalam melakukan sesuatu dan keberaniannya dalam memperlihatkan auratnya. (<http://suara.merdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/01/11>)

Sejalan dengan hal tersebut, Temuan penelitian Sunarto tentang Stereotipisasi Peran Gender Wanita dalam Program Televisi Anak (dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 8, Nomor 3, 2010*) menunjukkan adanya peran media televisi dalam mengukuhkan stereotipisasi peran gender wanita dalam bentuk peran sosial sebagai ibu rumah tangga, posisi sosial sebagai pendamping pria dan sifat personal emosional, pasif, pengolah dan penghindar konflik. Stereotipisasi semacam ini makin mengukuhkan konstruksi peran gender yang menyudutkan wanita.

Selanjutnya, Aliansi Jurnalis Independen dalam Kompas.com, menyebutkan, Pemberitaan tentang perempuan di surat kabar dan televisi masih menonjolkan peran perempuan di ranah domestik daripada ruang publik. Padahal tak sedikit perempuan yang mumpuni di berbagai bidang di ruang publik, bukan sekadar mahir memainkan perannya sebagai ibu dan istri. Citra perempuan masih saja klise dan kondisi ini bertentangan dengan Deklarasi Beijing yang menyebutkan dalam salah satu butirnya, bahwa gambaran perempuan di media harus seimbang dan tidak klise. Selain citra perempuan di media yang cenderung stereotip, pemberitaan media juga masih diskriminatif terhadap perempuan (tersedia di <http://female.kompas.com/read/2011/03/09>).

Seharusnya, media massa dapat memberikan pencerahan tentang keadilan gender, dimana baik laki-laki maupun perempuan dapat ber-

kiprah dalam dunia politik praktis (maju menjadi calon legislatif, maupun calon kepala daerah) dengan bersaing secara sehat sesuai dengan kemampuannya, katakanlah dengan debat calon yang ditayangkan secara terbuka tanpa keberpihakan gender.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Azis Hoessein dalam *Jurnal Perempuan*, setelah melalui kampanye bertubi-tubi melalui media publik, masyarakat mendapatkan pelajaran penting dalam benak mereka ketika bicara soal politik. Yaitu, politik harus melibatkan perempuan. Perempuan sudah mulai tercerahkan, mereka turut serta mengatur kebijakan politik sebagai bagian dari hak mereka pula (*Jurnal Perempuan No. 35, 2004*). Sehingga peran media yang mensosialisasikan keterwakilan perempuan dalam politik tidak dapat dinafikan seiring diterimanya ide keterwakilan perempuan dalam legislatif dan wilayah publik lainnya.

Hasil wawancara mendalam dengan informan di keempat wilayah penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mereka dalam lembaga politik (baik sebagai anggota legislatif maupun kader parpol) karena keterbukaan pikiran pentingnya kesetaraan perempuan, kesadaran ini muncul setelah mereka banyak melihat, mendengar berbagai informasi dari media tentang cerita sukses perempuan. Namun demikian, stereotip dan bias gender dalam berbagai iklan, sinetron dan berita seringkali memojokkan kaum perempuan sehingga dapat melanggengkan tentang gender sebagai hasil konstruksi sosial budaya yang dibangun, dikukuhkan oleh masyarakat selama ini, padahal semestinya media menjadi saluran penverahan bagi keseimbangan peran gender.

Di sisi lain untuk mengajak masyarakat berpartisipasi memilih kandidat perempuan sebagai wakil mereka dalam lembaga formal dapat menggunakan media sebagai sarana promosi. Media (cetak, elektronik, dan lain-lain) memegang peranan yang penting sehingga komunikasi menjadi lebih efektif baik antar kontestan dalam pemilu legislatif maupun antar kandidat capres-cawapres dengan massa pendukungnya. Peranan tersebutlah yang memungkinkan segala sesuatunya lebih efisien baik dalam hal waktu, tenaga maupun finansial masing-masing peserta pemilu. Salah satu

contohnya seperti iklan politik dalam media cetak dan elektronik, penggunaan *website* maupun *email* dalam berkampanye, ataupun penggunaan SMS untuk menyebarkan isu-isu politik. Bahkan jejak pendapat yang cukup laris diadakan oleh berbagai lembaga survei pun merupakan salah satu institusi yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi.

Tabel 1 menjelaskan hasil penelitian tentang efektivitas media yang mendorong masyarakat untuk memilih kandidat calon legislatif maupun calon kepala daerah yang disebar secara acak kepada 120 orang di daerah penelitian tentang dari mana mereka mengetahui siapa kandidat calon legislatif dan calon gubernur atau walikota atau bupati;

Dari hasil penelitian tersebut, media sangat berperan dalam mempromosikan kandidat legislatif maupun eksekutif sehingga dikenal oleh calon pemilihnya. Selanjutnya data tersebut diklarifikasi lebih jauh terhadap perempuan responden yang sedang menduduki kursi legislatif, hasil wawancara menunjukkan mereka yang terpilih menjadi anggota legislatif diantaranya mempromosikan media (cetak, elektronik) termasuk leaflet dan baligo untuk berkampanye karena ini terbukti efektif, disamping mereka pun berkampanye secara berkeliling dengan partainya dan mengadakan rapat akbar.

Dengan demikian, salah satu cara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan adalah pencitraan perempuan melalui media bukan sebaliknya media melanggengkan atau merekonstruksi secara sosial budaya yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah dan marginal, disamping itu perempuan calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah dapat menggunakan media untuk mengiklankan atau mempromosikan dirinya.

Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, baik dalam pelaksanaan program maupun dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini diberikan untuk berkontribusi terhadap sumberdaya atau bekerjasama baik dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan, maupun dalam evaluasi program pembangunan. (Cohen dan Uphoff, 1997).

Mikkelsen (2001:62) merumuskan konsep partisipasi sebagai (i) kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan, (ii) pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan, (iii) suatu proses aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu, (iv) pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek pembangunan, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial, (v) keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri, dan (vi) keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka (Malihah, 2007: 47, Komariah, 2009:27)

Empat aspek berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu (1) terlibat dan ikut sertanya rakyat harus sesuai dengan mekanisme politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, (2) meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumus-

Tabel 1. Sumber Informasi Pemilih tentang Kandidat Calon Legislatif

No	Sumber Informasi	Jumlah	Persentase
1	Televisi Nasional atau Lokal	87	72.5
2	Koran Nasional atau Lokal	20	16.6
3	Radio	13	10.4
	Jumlah	120	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2009 (diolah penulis)

kan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaik-baiknya, (3) partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik, dan (4) adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana (Bintoro, 1987:222).

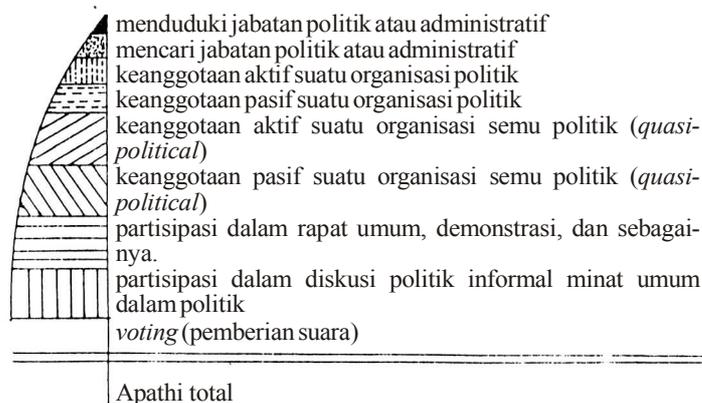
Konsep Partisipasi politik selalu penting dibicarakan dalam konsep politik, karena peranannya yang begitu urgen dalam suatu politik suatu bangsa. Sebagai definisi umum, Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan-kegiatan seperti ini mencakup tindakan seperti memberi suara dalam Pemilihan Umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pemerintah atau anggota parlemen (Budiardjo, 1982:1).

Rush dan Althoff (1986:23) memberikan pengertian partisipasi politik sebagai keterlibatan individu baik laki-laki maupun perempuan, sampai kepada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik sebagai berikut; (1) Menduduki jabatan politik atau administratif; (2) Mencari jabatan politik atau administratif; (3) Keanggotaan aktif suatu organisasi politik; (4) Keanggotaan pasif suatu organisasi; (5) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*); (6) Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*); (7) Partisipasi dalam rapat

umum, demonstrasi, dan sejenisnya; (8) Partisipasi dalam diskusi politik informal dan minat umum dalam politik; (9) *Voting* (pemberian suara).

Gambar 1 menjelaskan tingkatan partisipasi politik. Dalam penelitian ini yang disebut dengan partisipasi perempuan adalah keikutsertaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat untuk berperan dalam aktivitas politik praktis juga dalam kegiatan pembangunan masyarakat atau implementasi politik dalam arti luas. Partisipasi politik perempuan dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan melahirkan berbagai instrumen hukum dan perubahan paradigma yang tidak saja mengakomodasi kepentingan perempuan dalam arti biologis tetapi juga mengakomodasi perempuan dalam arti feminitas, sehingga terjadi keseimbangan peran gender.

Pembangunan berspektif gender adalah bagaimana mencapai keseimbangan peran laki-laki dan perempuan untuk membangun masyarakat atau manusia dan juga arah pembangunan tidak hanya bersifat maskulinitas tetapi juga feminitas. Dalam pengertian ini pembangunan yang selama ini bersifat maskulin ternyata harus diimbangi dengan sifat-sifat feminim, sehingga kegiatan politik khususnya politik praktis yang seringkali diidentikkan dengan sifat dan milik laki-laki diberi sentuhan dengan sifat feminim, sehingga politik tidak dianggap kejam, kasar, curang melainkan lebih santun, demokratis dan bernuansa sebagai sebuah rumah dan keluarga yang sejuk, damai dan penuh kasih sayang. Sebaliknya membangun manusia yang biasanya dimulai dari keluarga tidak selamanya menjadi milik kaum perempuan melainkan juga milik laki-laki,



Gambar Tingkatan Partisipasi Politik

karena secara psikologis pembinaan seorang anak memerlukan sentuhan sifat feminitas dan maskulinitas dari kedua orang tuanya. Di samping itu, biasanya terbentuknya pola pikir manusia yang menjadi konstruksi sosial dan budaya dimulai dari lingkungan yang paling dekat yaitu keluarga, sehingga sosialisasi peran gender harus dimulai dari keluarga. Keluarga yang membuka paradigma berfikir seorang individu apakah ia memberikan peran yang berbeda antara perempuan dan laki-laki atau baik laki-laki maupun perempuan diberi peran sosial yang sama.

Dalam kenyataannya, di keempat daerah masih banyak yang mempertukarkan antara peran gender yang dikonstruksi secara sosial dengan peran gender secara kodrati (seks). Kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya dapat diwujudkan, hal ini disebabkan oleh masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya yang bersifat patriarkhis, menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Keadaan demikian, memunculkan ketidakadilan seperti subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan, pandangan stereotif dan beban yang dipikul perempuan.

Hal ini, dapat menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tidak memiliki peluang dan kontrol atas pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Disamping itu ketidaktepatan pemahaman ajaran agama sering menyudutkan kedudukan dan peranan perempuan dalam masyarakat. Sistem yang merugikan hubungan laki-laki dan perempuan perlu diperbaiki, dengan landasan pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender yang sejalan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang dan dilandasi pula dengan pemahaman dan interpretasi ajaran agama yang benar agar semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku yang dapat mengakses, mengontrol, dan menikmati hasil pembangunan dan turut membangun manusia.

Partisipasi politik perempuan dalam perspektif gender dan pendekatan struktural fungsional adalah bahwa partisipasi perempuan merupakan unsur atau bagian dari sistem sosial masyarakat yang berkaitan satu sama lain untuk membangun masyarakat sebagai suatu sistem. Partisipasi politik perempuan dalam pembangunan masyarakat tidak

dimaksudkan untuk menjadikan polemik dan dikotomi peran secara biologis, melainkan menjadi sebuah pembagian kerja yang akan menjadi sebuah keteraturan dalam masyarakat, sehingga terwujudnya dinamika suatu sistem sosial masyarakat yang fungsional. Pembangunan tidak terlepas dari hubungan yang dilandasi gender, sebagaimana telah dijelaskan, dalam konteks sosiologis gender didefinisikan sebagai perbedaan-perbedaan sifat perempuan dan laki-laki yang tidak hanya mengacu pada perbedaan biologis, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial budaya sehingga menimbulkan nilai-nilai lain yang berlanjut menjadi nilai umum terhadap kelompok jenis tertentu (Parwati Soepangat, 1994 :1). Konsep ini lebih memberikan kemungkinan pembagian kerja yang luas bagi perempuan dan laki-laki. Dalam menelaah aspek gender sebagai sesuatu yang lahir dari proses sosial budaya, maka peran gender sebenarnya masih bisa dipertukarkan, karena perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebenarnya hanya terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri biologis yang dibawa sejak lahir, yaitu bahwa perempuan melahirkan, hamil dan menyusui sedangkan pria tidak.

Sebaliknya apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki adalah sesuatu yang dipelajari lewat interaksi sosial yang dijadikan konstruksi sosial. Hal-hal semacam ini sebenarnya dapat diubah manakala dibangun konstruksi baru. Peran perempuan yang identik dengan wilayah domestik sehingga seolah-olah perempuan tidak diperkenankan mengambil bagian dalam proses pembangunan masyarakat apalagi masuk wilayah politik praktis yang dianggap sebagai dunianya laki-laki sebenarnya adalah sebagai konstruksi sosial yang dapat direkonstruksi menjadi sebuah paradigma baru, bahwa politik dan aktivitas publik lain adalah milik bersama komponen masyarakat masing-masing anggota masyarakat dapat memainkan perannya untuk kemajuan masyarakat sebagai sebuah sistem yang teratur. Dengan demikian, terlepas dari perbedaan pandangan tentang kesadaran gender itu, pada dasarnya peranan gender tidak bersifat kodrati dan dapat diubah menuju keseimbangan.

Di keempat daerah penelitian masih terjadi disparitas gender yang antara lain ditandai dengan akses perempuan ke politik praktis masih rendah,

akses perempuan dalam pendidikan masih jauh di bawah laki-laki, akses perempuan dalam partisipasi angkatan kerja juga masih tertinggal. Akses perempuan dalam kegiatan masyarakat terlihat cukup tinggi dan partisipasi perempuan dalam membangun keluarga masih dominan. Pemahaman dan fenomena disparitas gender tersebut, adalah hal yang penting untuk memecahkan masalah perempuan, dan masalah-masalah pembangunan pada umumnya. Partisipasi perempuan dalam pembangunan tidaklah berarti hanya melihat ketidakadilan tetapi justru harus dilihat dalam konteks pemanfaatan perempuan sebagai sumber daya manusia untuk pembangunan.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan secara menyeluruh diartikan sebagai partisipasi perempuan dalam pembangunan tanpa mengurangi peranannya dalam keluarga. Perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta terlibat dalam proses pembangunan menyeluruh. Oleh karenanya penciptaan iklim sosial budaya yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik praktis dan pembangunan masyarakat haruslah dibentuk sehingga cita-cita pembangunan berwawasan gender dapat terlaksana, sebagaimana pendapat Pujiwati Sajogyo (1986:1) bahwa tindakan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan merupakan suatu tindakan efisien. Pembangunan berwawasan gender disini diartikan perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pembangunan.

Partisipasi perempuan dalam politik praktis dan pembangunan masyarakat hendaknya tidak mengurangi tugas kaum perempuan disektor domestik, karena itu harus ada keseimbangan antara sektor domestik dan publik. Upaya yang dapat dilaksanakan perempuan untuk keseimbangan tugas domestik dan publik ini adalah komitmen berbagi tugas dengan suami (jika sudah menikah) serta membangun komitmen bahwa tanggung jawab keluarga merupakan tanggung jawab bersama yaitu terletak ditangan suami istri dan selain itu sangat diperlukan kemampuan manajerial perempuan. Peran domestik yang dilaksanakan bersama oleh perempuan dan laki-laki atau suami istri

dalam keluarga terutama dalam pelaksanaan fungsi afeksi atau perlindungan sosial-psikologis melalui perhatian dan kasih sayang, serta fungsi sosialisasi serta pelaksanaan tugas orang tua dalam merawat serta mendidik anak-anak (*shared-parenting*) melalui sosialisasi.

Peran perempuan dalam sektor domestik sebagai pengelola rumah tangga janganlah dianggap sebagai peran yang tidak signifikan dalam proses pembangunan masyarakat, justru dari rumah tangga ini dapat dijadikan pendidikan politik pertama bagi anak-anak, yang dapat menumbuhkan nilai-nilai demokratis manakala memiliki seorang ibu yang cerdas, berwawasan luas, disamping itu ibu dapat memotivasi anak-anak untuk turut serta membangun masyarakat.

Dalam pandangan tersebut, partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat tidaklah dapat dikatakan rendah, karena pembangunan masyarakat pada hakekatnya adalah pembangunan manusia dan lingkungan manusia terkecil adalah dalam keluarga. Hal yang terpenting adalah membangun paradigma berpikir perempuan untuk memajukan bangsa, sehingga keterlibatan perempuan dalam pembangunan dapat dimainkan dari keluarga. Partisipasi politik perempuan di empat daerah penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mereka ditujukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara, bahwa perempuan adalah sebagai warga negara mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk membangun bangsa, baik partisipasi langsung maupun tidak langsung. Hal terpenting adalah bagaimana membangun warga negara yang cerdas serta bagaimana membangun bangsa dan negara atas dasar kesetaraan dan keadilan melalui kemitraan antara laki-laki dan perempuan, melalui pembangunan berwawasan gender, sebagai suatu struktur yang fungsional menuju keseimbangan.

Keikutsertaan perempuan dalam kegiatan politik dan pembangunan masyarakat tentu saja dapat menyebabkan berubahnya sistem keluarga sebagai sistem sosial, namun perubahan itu tentu saja harus diarahkan menuju keseimbangan agar fungsi manifest (fungsi yang tidak diinginkan, misalnya disharmonisasi keluarga) tidak pernah terjadi, namun secara menyeluruh justru perubahan ini membawa dampak kearah perbaikan. Dengan

demikian, penerapan pendekatan struktural fungsional dalam penelitian ini justru tidak anti perubahan apalagi dikaitkan dengan analisis gender yang justru menginginkan perubahan.

Dalam perspektif gender, perempuan diikutsertakan dalam aktivitas publik karena selama ini dirasakan terjadi diskriminasi terhadap perempuan, misalnya angka keterwakilan perempuan dalam politik formal dan partisipasi perempuan dalam tiga ukuran pembangunan manusia (IPM) masih rendah secara kuantitas sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan gender dalam pembangunan, karena itu dalam perspektif gender harus terjadi keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Analisis ini tentu saja berdampak pada berubahnya sistem keluarga sebagai sistem sosial akibat perubahan pemikiran itu. Namun dalam hal ini penulis memandang pendekatan struktural fungsional dalam penelitian ini adalah untuk memperkuat sistem keluarga dimana masing-masing anggota keluarga mempunyai peran dan diberi kesempatan yang sama untuk memainkan peran tersebut, disinilah akan memperkuat analisis gender bahwa keluarga merupakan dasar pembentukan peran berdasarkan gender. Dengan demikian analisis gender dan pendekatan struktural fungsional hasil penelitian ini memandang bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus memainkan peran seimbang antara keluarga (domestik) dan peran diluar keluarga (publik) sehingga fungsi keluarga di zaman moderen ini terutama dalam fungsi sosialisasi anak dan *tension management* untuk masing-masing anggota keluarga laki-laki dan perempuan dirasakan semakin seimbang.

Di empat daerah penelitian pola budaya memberikan kecenderungan perempuan untuk mengisi tugas-tugas domestik namun demikian informan umumnya tidak menolak perubahan untuk terlibat dalam aktivitas kegiatan diluar rumah tanpa meninggalkan pola budaya yang sudah tertanam kuat, sehingga dewasa ini sudah berkembang pemikiran moderen dalam keluarga dimana baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peran masing-masing untuk memperkuat fungsi keluarga dan kegiatan aktivitas publik tidak menimbulkan disharmonisasi. Salah satu kunci keberhasilan Partisipasi perempuan dan atau aktivitas publik perempuan adalah dipengaruhi

oleh pola komunikasi dalam keluarga, karena dari keluargalah dimulai segala aktivitas serta pola budaya dimana perempuan itu berada.

Penelitian tentang partisipasi politik perempuan dan aktivitas publik lainnya memerlukan pemahaman tentang budaya dan nilai-nilai yang ada didalamnya. Nilai-nilai budaya mempunyai fungsi sebagai suatu pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep suatu nilai budaya bersifat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan berada dalam daerah psikologis pada individu yang bersangkutan, sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam jiwa mereka atau sudah menjadi idiologi suatu masyarakat.

Sehingga dalam ukuran sistem budaya bahwa kecenderungan perempuan diempat wilayah penelitian untuk lebih memprioritaskan aktivitas dalam rumah tangga bukanlah hal yang negatif, namun sebaliknya justru prioritas ini dijadikan sebagai pijakan untuk memperkuat aktivitas diluar rumah tangga (Resume hasil wawancara).

Kontruksi sosial budaya tentang gender telah menguat sedemikian rupa, sehingga gender sering disebut alat kelamin sosial, dan melekat dalam kehidupan sehari-hari, padahal peran gender ini dapat dipertukarkan, dimana perempuan dan laki-laki dapat berkiperah sesuai dengan kemampuannya tanpa harus takut dicap keluar dari kodrat sosialnya. Karena secara kodrati yang membedakan adalah perempuan dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui sementara laki-laki tidak. Sebaliknya laki-laki memiliki testis, jakun perempuan tidak, hal inilah yang tidak bisa dipertukarkan merupakan kodrati bukan kontruksi sosial budaya.

Dalam kaitan ini masih ditemukan berbagai bias gender dalam tayangan media, sehingga media turut mengonstruksi secara sosial budaya tentang peran gender.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan; (1) Partisipasi politik perempuan dalam arti luas yaitu peran mana yang dapat dimainkan perempuan dalam arti biologis dan perempuan dalam arti feminitas (sifat keperempuan)

adalah sebuah keniscayaan agar berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara umumnya dan persoalan 'keperempuan' khususnya dapat dituntaskan dan merupakan tanggungjawab bersama laki-laki dan perempuan.

(2) Partisipasi Politik Perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat dan mendukung baik yang bersifat sosiologis, antropologis maupun psikologis, termasuk peran media dalam merekonstruksi sosial budaya peran gender; (3) Partisipasi Perempuan dalam membangun masyarakat tidaklah dapat dikatakan rendah, meskipun partisipasi dalam politik praktis melalui angka keterwakilan di legislatif maupun eksekutif masih rendah dan perempuan di keempat daerah penelitian sebagian besar berpartisipasi sebagai *voters*. Salah satu penyebabnya karena dalam sistem budaya telah menempatkan perempuan untuk membangun masyarakat atau manusia melalui pendidikan dan aktivitas keluarga dan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan membangun masyarakat di lingkungan sekitar rumahtangganya, hal ini turut dilanggengkan dengan berbagai pemberitaan media yang menempatkan perempuan di sektor domestik, masih terjadi bias gender dalam media; (4) Namun demikian, mengukur kualitas partisipasi politik tidaklah cukup dengan mengukur angka keterwakilan (secara kuantitas) dalam lembaga politik formal, melainkan seberapa besar kualitas yang dibangun kaum perempuan untuk memajukan dan membangun manusia, hal ini juga yang belum disuarakan oleh media baik cetak maupun elektronik; (5) Media dapat memperkuat konstruksi sosial budaya yang selalu menempatkan perempuan dari sisi afeksi (kepekaan, kasih sayang, lemah lembut, dan lain-lain) dan posisi marginal. Sebaliknya, Media juga dapat mempengaruhi pencitraan perempuan tentang peran dan partisipasinya sehingga mempengaruhi opini publik lebih jauh mempengaruhi keputusan para pemilih. Media turut mempengaruhi pencitraan peran perempuan dalam politik, yang turut membentuk pikiran calon pemilih untuk tidak memilih kaum perempuan menduduki kursi legislatif karena mereka beranggapan perempuan tidak cocok dalam jabatan ini, terlebih ditambah informasi yang gencar dari media dan diskursus peran gender yang cenderung memojokkan perem-

puan dan berakibat ketidakadilan; (6) Partisipasi politik perempuan di empat daerah penelitian (Kota Bandung, Kab. Bogor, Kab. Garut dan Kota Cirebon) tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam aktivitas dan peranan mereka dalam kegiatan politik dan pembangunan masyarakat, melainkan terdapat kecenderungan yang hampir sama karena dipengaruhi oleh sistem nilai budaya, sistem perundangan dan agama yang mereka anut secara sama pula, di keempat daerah penelitian, kecenderungan mereka yang terpilih menjadi anggota legislatif umumnya telah menggunakan media dan teknologi informasi dalam kampanyenya. Sementara dorongan partisipasi mereka juga turut dipengaruhi oleh berbagai tayangan media tentang perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan di berbagai belahan dunia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan, aktivis perempuan, tokoh masyarakat, dan lain-lain yang telah memberikan informasi untuk keperluan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Tim Peneliti Hibah Bersaing Universitas Pendidikan Indonesia yang telah bersama-sama melakukan penelitian yang berjudul *Studi tentang Kedudukan, Peran, dan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif*. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada DP2M Dikti yang membiayainya selama tiga tahun berturut-turut, juga kepada pihak LPPM Universitas Pendidikan Indonesia yang mendukung penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Creswell W. John, 1994, *Research Design, Quantitative & Qualitative Approaches*, Sage Publications, Inc.
- Cohen dan Uphorff, 1997, *Rural Development Participation*, Cornell University, New York.
- Effendy, Onong Uchjana, 1993, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Maran, 1998, *Sosiologi Politik*, Rajawali, Jakarta.
- Malihah, Elly, 2007, Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Masyarakat, *Disertasi*, tidak diterbitkan, PPS Universitas Padjadjaran, Bandung.
- _____, 2009, Studi tentang Rekonstruksi Sosial Budaya Media tentang Partisipasi Politik Perempuan, *Penelitian Mandiri*, tidak diterbitkan, LPPM Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- _____, dan Kolip, Usman, 2011, *Penngatar Sosiologi Politik*, Prodi Pendidikan Sosiologi, FPIPS, Diktat Kuliah.
- Mikkelsen, Britha, 2001, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mulyana, Deddy, 1999, *Nuansa-nuansa Komunikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*, Rosdakarya, Bandung.
- Sajogyo, Pujiwati, 1986, *Pola Bekerja Wanita Pedesaan dalam Pembangunan*, Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB, Bogor.
- Uphoff, 1979, dalam Bintoro, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Vreeger, K.J., 1986, *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Gramedia, Jakarta.
- Vrendenberg, J., 1978, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Malihah, Elly, 2007, Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Masyarakat, *Disertasi*, tidak diterbitkan, PPS Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Malihah, Elly, 2009, Studi tentang Rekonstruksi Sosial Budaya Media tentang Partisipasi Politik Perempuan, *Penelitian Mandiri*, tidak diterbitkan, LPPM Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Yayasan Jurnal Perempuan, *Perempuan dan Media*, 20. 28, 2003, ISSN: 1410-153X.
- Yayasan Jurnal Perempuan, *Hanya Satu Kata Optimis*, 35, 2004, ISSN: 1410-153X.
- Dewi, Machya Astuti, 2009, Media Massa dan Penyebaran Isu Perempuan, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN 'Veteran' Yogyakarta, Volume 7, Nomor 3, 2009, ISSN: 1693-3029.
- Sunarto, 2010, Stereotipisasi Peran Gender Wanita dalam Program Televisi Anak, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN 'Veteran' Yogyakarta, Volume 8, Nomor 3, 2010, ISSN 1693-3029.
- Rachmawati, 2010, Bias Gender dalam Iklan Attack Easy, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN 'Veteran' Yogyakarta, Volume 8, Nomor 3, 2010, ISSN 1693-3029.
- Kompas.Com, *Citra Perempuan di Pemberitaan Media Massa Masih Klise*. Tersedia : <http://female.kompas.com/read/2011/03/09>,
- Suara Merdeka.com, *Bias Gender dalam Media Massa*, Tersedia : <http://suara.merdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012>,